



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

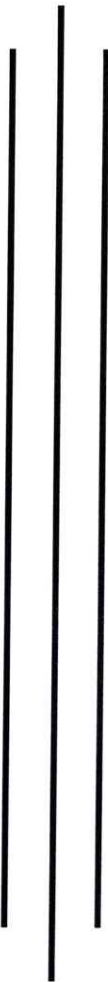
WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025





**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Bappeda, maka perlu dipertimbangkan dinamika perkembangan pembangunan, baik secara politis maupun secara ekonomis. Bappeda selalu berusaha merespon tuntutan perubahan dengan terus melakukan adaptasi dan inovasi agar pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini memberi dampak yang lebih baik bagi peningkatan kinerja Bappeda Kota Batam.

Batam, Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Batam



Dahlina Nopilawati, S.T
NIP. 19751121 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berjalan	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Catatan Penting	32
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	32
4.3 Rencana Tindak Lanjut	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	5
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan I.....	11
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Bappeda	11
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605);
8. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 7 tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Indikator kinerja program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah 5 (lima) indikator program dan teralisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen , dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 25%, target sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.
2. Capaian kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 18,18%, target sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.
3. Capaian kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah 100,96%, atau melebihi target Tahun 2025.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25	25
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	0,00	0,00
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	0
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	25	25
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	54	90,00
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	3	25,00
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0,00	0,00
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	0	0,00
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	28	28
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	4	80
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	0	100
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0	50
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3	25
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	5,71	5,71
10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	1	100
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1	100
12. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0	0
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 unit	0	0
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	21,43	21,43
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	0	0
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3	25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	0,00	0,00
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	0	0
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	0	0
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	0	0
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0	0
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	18,18	18,18
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	18,18	18,18
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang	100%	18,18	18,18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
	menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			
8. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	15	100
20. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120 dokumen	11	9,17
21. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	0	0
22. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66 dokumen	6	9,09
23. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 laporan	0	0
9. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 PD	10	100
24. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	77 dokumen	7	9,09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
25. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 laporan	0	0
26. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33 dokumen	3	9,09
27. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	0	0
10. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 PD	18	100
28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55 Dokumen	5	9,09
29. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 laporan	1	20,00
30. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	143 dokumen	13	9,09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 laporan	3	23,08
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98%	100,96	100,96
11. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	51,11	52,22
32. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	86 Berita Acara	45	50
33. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1	50
34. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	0,00	50
12. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100%	71,77	50
35. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	208 orang	150	72,12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I (s.d. Juni) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5
36. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	0	0
13. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100%	0	0
37. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah Tahun 2025 berjumlah 2 (dua) indikator sasaran dan teraealisasi pada penganggaran APBD Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) indikator sasaran atau 100 persen.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan.	Persentase	91	Persentase	0	Capaian sasaran RPJMD dihitung per semester
2	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Persentase	93	Nilai	0	Survei dilakukan satu kali dalam setahun (di Bulan Desember)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda sampai dengan Triwulan I telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan.

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Bappeda

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Batam masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan Kota Batam yang akuntabel, efektif dan efisien.	Ketersediaan data perencanaan yang valid/akurat Analisa data yang belum memadai Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai rujukan untuk perencanaan berikutnya Masih kurangnya manajemen sumber daya manusia perencana yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya pemanfaatan SOP dan evaluasi pelaksanaan SOP yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Regulasi/kebijakan tingkat pusat yang sering berubah
			Belum optimalnya pemanfaatan kebijakan/regulasi perencanaan tingkat kota
		Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah kurang mempedomani dokumen perencanaan PD yang lebih tinggi.
			Belum dijalankannya SOP terkait sinkronisasi perencanaan
			Kurangnya kompetensi SDM perencana di PD dan Bappeda
			Faktor komitmen dari pimpinan perangkat daerah mitra.
			Faktor perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dalam rangka penyesuaian kelembagaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah telah dilakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Batam yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu perubahan Strategis yang terjadi adalah perubahan nama Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Dinamika kebijakan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 telah mengakibatkan perbedaan antara dokumen penganggaran (APBD Tahun 2025) dengan Renja Bappeda Tahun 2025. Dimana pada tahap penyusunan dokumen perencanaan telah ditetapkan dua Renja, terdiri dari:

1. Renja Bapelitbangda, yang mengakomodir kebutuhan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2025;
2. Renja Bappeda, yang mengakomodir kebutuhan anggaran Bulan September sampai dengan Desember 2025.

Namun, kemudian pada tahapan penganggaran APBD 2025, TAPD memutuskan untuk menggabung kebutuhan anggaran pada kedua Renja tersebut menjadi satu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Batam.

Oleh karena itu, pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian untuk menyelaraskan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan secara akuntabel, efektif, efisien dan sesuai arah kebijakan strategis.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 sebanyak 3 Program 13 Kegiatan dan 37 Subkegiatan dengan anggaran sebesar Dua Puluh satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah (21.344.226.695,00)

Sedangkan pada perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 mengalami perubahan menjadi 3 Program 13 Kegiatan dan 35 Subkegiatan dengan anggaran sebesar Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah (19,288,096,128) dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1.1.1 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- 1.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 1.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD
- 1.2.2 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten/Kota Batam
- 1.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
 - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 2.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
 - 2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 2.2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
 - 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2.3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 3.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 3.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
- 3.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3.5.3 Pengadaan Mebel
- 3.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 3.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 3.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 3.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Adapun Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp186.382.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp107.913.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja konsumsi dan honorarium narasumber dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- 2) Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp809.475.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp249.514.500,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja honorarium dan perjalanan dinas narasumber dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- 3) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp773.971.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp757.438.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja konsumsi dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Subkegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp408.230.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp163.394.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja perjalanan dinas dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota.

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp203.097.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp159.221.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja konsumsi dan honorarium tenaga ahli dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp25.870.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp19.105.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja konsumsi dan honorarium tenaga ahli dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

2) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp55.800.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp167.780.000,00. Penambahan anggaran ini direncanakan untuk mendukung penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp6.250.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp216.559.000,00.

Penambahan anggaran ini direncanakan untuk mendukung kewajiban daerah dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, sekaligus untuk menindaklanjuti temuan BPK RI.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp128.712.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp82.088.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja honorarium tenaga ahli dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp15.064.718.939,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp14.333.232.100,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya berupa penyesuaian kebutuhan gaji ASN dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp149.226.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp69.773.000,00. Pengurangan anggaran ini merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas, sehingga dilakukan pengurangan perjalanan dinas untuk bimtek.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp19.349.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp11.496.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja baterai, lampu dan kabel dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- 2) Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Kantor Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp362.383.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp239.957.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja bahan computer tinta, kertas, ATK dan perabotan kantor dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- 3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp96.630.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp49.966.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari

- belanja photocopy dan kertas dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- 3) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp914.397.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp434.253.000,00. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi sumber daya dari belanja perjalanan dinas dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja.
- e. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp396.237.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp696.845.000,00. Penambahan anggaran dilakukan untuk peningkatan sarana prasarana perkantoran berupa: laptop, PC, monitor, camera video conference dan smart tv.
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Mebel
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp8.700.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp0.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.620.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp17.082.000,00. Penambahan anggaran dilakukan untuk pembayaran air dan listrik pada rumah dinas Bappeda di Jl. Kartini, Sekupang.
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.620.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp17.082.000,00. Penambahan anggaran dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan pembayaran gaji tenaga kontrak.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah
- 1) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp44.571.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 bertambah menjadi Rp48.861.000,00. Penambahan anggaran dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan belanja pemeliharaan *air conditioner* (AC).
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
Semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp227.327.700,00 pada perubahan Renja Tahun 2025 berkurang menjadi Rp0,00.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode				Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						21.344.228.695	19.288.096.128	- 2.056.132.567	
1				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.344.228.695	19.288.096.128	- 2.056.132.567	
1	1			PERENCANAAN						21.344.228.695	19.288.096.128	- 2.056.132.567	
1	1	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100%	93	18.716.340.295	17.288.358.228	- 1.427.982.067	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Nilai Sakip Perangkat Daerah		73.53				
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	128.712.000	82.088.000	- 46.624.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	128.712.000	82.088.000	- 46.624.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	15.106.398.939	14.374.912.100	- 731.486.839	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan	15.064.718.939	14.333.232.100	- 731.486.839	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	41.680.000	41.680.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	149.226.000	69.773.000	- 79.453.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	6 Orang	149.226.000	69.773.000	- 79.453.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persenta	100%	100%	1.413.859.000	756.772.000	- 657.087.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.349.000	11.496.000	- 7.853.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	362.383.000	239.957.000	- 122.426.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	21.100.000	21.100.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	96.630.000	49.966.000	- 46.664.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	914.397.000	434.253.000	- 480.144.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	1.230.600.000	1.522.508.000	300.608.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	484.095.000	484.095.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	1 Unit	341.568.000	341.568.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Lapangan yang Disediakan	Lapangan yang Disediakan						
1	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0	8.700.000	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	34 Unit	396.237.000	696.845.000	300.608.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	170.435.656	188.234.128	17.798.472	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	1.620.000	17.082.000	15.462.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	168.815.656	171.152.128	2.336.472	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	517.108.700	294.071.000	4.290.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.880.000	40.880.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 Unit	204.330.000	204.330.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	71 Unit	44.571.000	48.861.000	4.290.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	1	2.09	9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	0	227.327.700	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Dipelihara/ Direhabilitasi	Dipelihara/ Direhabilitasi							
5	1		2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	98%	100%	2.475.719.400	1.532.044.900	- 943.674.500	
5	1		2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Penyusunan Dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	100%	100%	1.769.828.000	1.114.865.500	- 654.962.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1		2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	86 Berita Acara	90 Berita Acara	186.382.000	107.913.000	- 78.469.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.01		5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	809.475.000	249.514.500	- 559.960.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.01		7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	773.971.000	757.438.000	- 16.533.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutahirkan sesuai standar data daerah	Persentase Analisis data dan informasi yang dimanfaatkan	100%	100%	502.794.400	257.958.400	- 244.836.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.02	2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	208 Orang	150 Orang	408.230.000	163.394.000	- 244.836.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.02	3		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	94.564.400	94.564.400	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi yang ditindak lanjuti	100%	100%	203.097.000	159.221.000	- 43.876.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	2.03	1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	3 Laporan	203.097.000	159.221.000	- 43.876.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu,	Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM	100%	20	152.169.000	467.693.000	315.524.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang Perekonomian dan SDA	100%	20					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	20					
1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan	15 Perangkat Daerah	100%	93.272.000	198.487.000	105.215.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	dan pembangunan manusia						
1	3	2.01	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120 Dokumen	33 Dokumen	25.870.000	19.105.000	- 6.765.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.01	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1.702.000	1.702.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.01	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66 Dokumen	18 Dokumen	9.900.000	9.900.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	2 Laporan	55.800.000	167.780.000	111.980.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	10 Perangkat Daerah	100%	27.913.000	27.913.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen	21 Dokumen	5.600.000	5.600.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	2 Laporan	9.325.000	9.325.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	33 Dokumen	9 Dokumen	6.699.000	6.699.000		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	6.289.000	6.289.000		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	18 PD	100%	30.984.000	241.293.000	210.309.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	55 Dokumen	15 Dokumen	10.323.000	10.323.000		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan serta pengembangan berbagai potensi yang ada di lingkungan Bappeda Kota Batam dan menundukung tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam akan terus melakukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan meliputi: peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi dan adaptasi terhadap perubahan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025);
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Saat ini Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berjalan selaras dengan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2025-2029. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi dan adaptasi terhadap perubahan, maka akan ditindaklanjuti dengan:

1. Meningkatkan kompetensi SDM perencana;
2. Menyempurnakan proses perencanaan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
3. Memastikan perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat serta melibatkan partisipasi publik;
4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, seperti sistem informasi perencanaan daerah, pemetaan potensi daerah dan *big data analytic* untuk analisis kebutuhan pembangunan;

5. Meningkatkan koordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal, untuk memastikan keselarasan tujuan dan program pembangunan;
6. Melakukan analisis risiko terhadap berbagai potensi perubahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD